

FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Oleh :

Dien Noviany R. NIDN 0628117502

Dewi Indriasih NIDN 0616058002

Ibnu Muttaqin NIDN 0626019201

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian		FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
Tim Pengusul		
Ketua		
Nama Lengkap	:	Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., CA.
NIDN	:	0628117502
Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
Program Studi	:	Akuntansi
Alamat Email	:	diennovi@upstegal.ac.id
Anggota		
Nama Lengkap	:	Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M., Ak.
NIDN	:	0616058002
Jabatan Fungsional	:	Lektor
Program Studi	:	Akuntansi
Alamat Email	:	
Anggota 2		
Nama	:	Ibnu Mutaqin S.Pd.,M.Si, AFA
NIDN	:	0626019201
Jabatan Fungsional	:	Lektor
Program Studi	:	Akuntansi
Alamat Email	:	0626019201@gmail.com
Lokasi Penelitian	:	Kota Tegal
Lama Penelitian	:	3 bulan
Biaya Penelitian	:	Rp. 10.000.000
Sumber Dana	:	UPS TEGAL
		Tegal, 2020
Mengetahui,		
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis		Peneliti,
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> Dr. Dien Noviany R. S.E., M.M., AK. C.A NIDN. 0628117502 </div> <div style="text-align: center;"> Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., CA. NIDN.0628117502 </div> </div>		
<div style="text-align: center;"> Menyetujui, Ka. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dr. Ir. Suyono, M.Pi NIDN. 0015016601 </div>		

PENDAHULUAN

Proses akuntansi atau tata keuangan saat ini telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan sistem keuangan modern. Perkembangan dan perubahan akuntansi sebagai bagian dari proses sosial yang tidak bisa dipisahkan karena budaya suatu bangsa merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sistem akuntansi dan perubahan akuntansi disuatu negara.

Fenomena perkembangan akuntansi pemerintah telah terjadi sejak jaman Kerajaan Mesir Kuno dan kerajaan Mesopotamia (Mardiasmo 2006). Pada waktu itu digunakan sebagai pencatatan pajak dan dibuktikan dengan penemuan catatan akuntansi pada lempengan tanah. Dalam perkembangannya akuntansi bisnis berkembang lebih pesat dibanding akuntansi pemerintah. Indonesia termasuk negara yang tergolong lamban dalam perkembangan akuntansi pemerintah(Mardiasmo 2006). Perkembangan signifikan baru terjadi pada tahun 2000-an yaitu sejak diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Mardiasmo 2006).

Indonesia menerapkan otonomi daerah sebagai sistem pemerintahannya. Dengan penerapan sistem tersebut maka masing-masing daerah memiliki wewenang untuk mengatur sendiri segala urusan pemerintahannya, serta dengan adanya wewenang tersebut maka pemerintah daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Menurut undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah, upaya untuk pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan yaitu dengan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan menerapkan kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang disajikan berarti pemerintah daerah dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

Teori Keagenan (Agency Teori)

Menurut Zimmerman (1997) agency problem juga terdapat dalam organisasi pemerintah. Dalam hal ini rakyat sebagai principal yang memberikan mandat kepada pemerintah sebagai agen untuk menjalankan tugas pemerintahan. Menurut (Mardiasmo 2005) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik sebagai pemegang mandat (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak yang memberi mandat (Principal) yang memiliki hak untuk mendapat pertanggungjawaban. Terdapat dua macam akuntabilitas publik, yaitu :

1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dan kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Dalam prakteknya pelaporan keuangan pada pemerintah daerah didasari teori keagenan. Pemerintah daerah bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat sebagai informasi bagi para pengguna /stakeholder, dalam hal ini bertindak sebagai prinsipal yang berhak menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, politik berdasarkan informasi tersebut. Dalam suatu pemerintahan yang demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (Rosalin 2011).

SUMBER DAYA MANUSIA

Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau Individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi - fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Winidyaningrum 2009). Kapasitas sumberdaya manusia harus dilihat dari kemampuan untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, maka dari itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Sukmaningrum 2012).

Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan pengalaman dibidang keuangan. Hutapea (2008) menyatakan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan, kemampuan, dan perilaku individu yang dimiliki oleh masing-masing individu.

1. Pengetahuan

Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu). Pegawai turut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.

2. Ketrampilan

Ketrampilan (skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya ketrampilan dalam memahami dan memotivasi orang lain baik secara individu maupun kelompok.

3. Sikap

Sikap (attitude) merupakan pola tingkah laku seorang pegawai didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan organisasi.

Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif dan ekonomis. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia tersebut maka pembuatan laporan keuangan akan lebih efektif dan efisien. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan (Mardiasmo 2005).

Kualitas Laporan Keuangan

Kriteria dan unsur- unsur kualitas atau niali informasi dari laporan keuangan pemerintah telah ditentukan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ada empat macam karakteristik kualitas informasi keuangan yaitu;

a. Relevan,

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Informasi yang relevan dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang dan masa depan (*predictive value*), dan memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya (*feedback value*), serta informasi harus tersedia tepat waktu bagi pengguna informasi untuk pengambilan keputusan (*timeliness*)

b. *Reliable* / Andal

Keandalan informasi bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan informasi akan berbadan tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila:

1. Dapat diverifikasi (*verifiable*)

Suatu informasi diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda dengan metode yang sama akan menghasilkan hasil akhir yang sama.

2. Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan.

3. Penyajian secara wajar (*representation faithfulness*)

Menggaambarkan keadaan secara wajar dan lengkap, menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dilakukan apabila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

d. Dapat dipahami.

Informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud

Standar Akuntansi Pemerintah

Mardiasmo (2002) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.

Sesuai undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara pada BAB VII mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD pasal 32 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Bentuk dan Isi laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi

pemerintahan

- (2) Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang disingkat SAP. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah.

Standar akuntansi pemerintahan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 memuat 11 (sebelas) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi pemerintah, yaitu :

- 1) PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan standar ini memiliki tujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan dengan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basisi kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

- 2) PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan standar LRA (Laporan realisasi anggaran) adalah menyediakan informasi mengenai realiasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing masing dibandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna untuk mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

- 3) PSAP No. 03 Laporan Arus Kas

Tujuan pernyataan standar LAK (laporan arus kas) adalah mengatur penyajian arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas

dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi. Pelaporan arus kas memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

4) PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan) untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada CaLK. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat berpotensi mengandung kesalahpahaman informasi diantara pembacanya, sehingga dalam laporan keuangan dibuat CaLK yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

5) PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan

Pernyataan standar akuntansi persediaan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

6) PSAP No 06 Akuntansi Investasi

Pernyataan standar akuntansi investasi untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Investasi pemerintah dibagi menjadi dua macam yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar dan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.

7) PSAP No 07 Akuntansi Aset Tetap

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap, yang meliputi klasifikasi, pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan. Pernyataan standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam rangka keonseptual akuntansi pemerintahan.

8) PSAP No 08 Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan

Tujuan pernyataan standar konstruksi dalam pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai

historis. Pernyataan standar ini memberikan panduan untuk (a) indentifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai konstruksi pengerjaan; (b) penetapan besarnya biaya yang dapat dikapitalisasi dan disajikan dineraca; (c) penetapan berbasis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

9) PSAP No 09 Akuntansi Kewajiban

Tujuan pernyataan standar akuntansi kewajiban untuk mengatur perlakuan akuntansi meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban. Kewajiban timbul karena adanya konsekuensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari tindakan masa lalu.

10) PSAP No 10 Koreksi Kesalahan

Tujuan pernyataan standar koreksi kesalahan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Laporan keuangan untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa suatu entitas harus disusun dan disajikan dengan menerapkan pernyataan standar ini.

11) PSAP No 11 Laporan Keuangan Konsolidasi

Tujuan pernyataan standar ini untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan.

12) PSAP No 12 Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang terceminikan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

BAB III

Pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau Individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Winidyaningrum 2009). Kapasitas sumberdaya manusia harus dilihat dari kemampuan untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, maka dari itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Sukmaningrum 2012).

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang karyawan yang berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jika kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif.

Mahaputra dan Putra (2014) dalam penelitiannya membuktikan bahwa kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Bukti penelitian ini didukung hasil penelitian (Desianawati, Herawati, dan Sinarwati 2014) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan melalui unsur-unsur sistem pengendalian intern ini dengan melakukan langkah-

langkah seperti penguatan pengawasan, pemisahan tupoksi yang jelas, pendelegasian wewenang, dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah, pencatatan yang akurat dan tepat waktu serta melakukan pengujian sistem pengendalian intern yang sudah ada. Untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik, unsur-unsur tersebut harus berjalan baik. Dengan demikian, sistem pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakbasahan data dan informasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang disingkat SAP. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah. Mardiasmo (2002) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan dalam dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga standar akuntansi keuangan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Apabila standar akuntansi pemerintahan telah dipahami maka akan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan benar. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kualitas laporan keuangan daerah yang baik akan berdampak pula pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

BAB IV

Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa nilai b_1 adalah 0,266 yang berarti hubungan antara sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan positif. Hasil olah data dengan regresi juga menunjukkan nilai $\text{sig.}=0,002$ dengan *Level of Significant*= 5%, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh antara sumber daya manusia (H_1) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).

Kompetensi sumber daya manusia yang dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Adanya kompetensi sumber daya manusia maka akan mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dapat diterapkan.

Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia dapat diketahui apakah suatu pemerintahan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional, efektif, dan efisien. Sehingga dengan adanya kompetensi sumber daya manusia mendorong terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas yang bebas dari salah saji material dan pengertian yang menyesatkan (Desianawati, Herawati, dan Sinarwati, 2014).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra dan Putra (2014) dan Desianawati, Herawati, dan Sinarwati (2014) menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan tidak sejalan dengan penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa nilai b_2 adalah 0,264 yang menunjukkan hubungan sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif.

Menurut Sukmanirngum (2012) Sistem Pengendalian Internal merupakan pengendalian kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah.

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan melalui unsur-unsur sistem pengendalian intern ini dengan melakukan langkah-langkah seperti penguatan pengawasan, pemisahan tupoksi yang jelas, pendelegasian wewenang, dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah, pencatatan yang akurat dan tepat waktu serta melakukan pengujian sistem pengendalian intern yang sudah ada. Untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik, unsur-unsur tersebut harus berjalan baik (Mahaputra dan Putra, 2014). Dengan demikian, sistem pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakbasahan data dan informasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra dan Putra (2014), Sukmaningrum (2012), dan Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan harus mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Standar tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan (PP No. 71 Tahun 2010).

Standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan dalam dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga standar akuntansi keuangan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Apabila standar akuntansi pemerintahan telah dipahami maka akan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan benar. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kualitas laporan keuangan daerah yang baik akan berdampak pula pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Mahaputra dan Putra, 2014).

Adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, dalam hal ini laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena semua transaksi dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku dan disajikan secara jujur dan lengkap dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan diharapkan dapat mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik maka pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kualitas laporan keuangan akan dapat ditingkatkan (Nugraheni dan Subaweh, 2008).

